



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN**

Tahun Sidang	:	2015 - 2016
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	<i>Courtesy call</i>
Sifat Rapat	:	Tertutup
Hari/Tanggal	:	Rabu, 31 Agustus 2016
Waktu	:	13.00 WIB s.d. selesai
Tempat	:	Gedung Nusantara III, lantai IV (empat)
Acara	:	1. Pertemuan dengan Delegasi National Defence College (NDC) Bangladesh 2. Lain-lain
Ketua Rapat	:	Ketua DPR RI Dr. Ade Komarudin
Sekretaris Rapat	:	Kepala Bagian Kerjasama Bilateral Drs. Robert Juheng Purba
Hadir	:	1. Chowdhury Hasan Sarwady, Chairman of Delegation 2. Shahid Hasan, Delegation 3. Ahmad Tajuddin Bin Abdul Ghani, Delegation 4. Saud Mohamed Abdul Rahman Al Balushi, Delegation 5. Shah Zaman, Delegation 6. Mohd, Ismaon Haji Zainie, Delegation 7. Nasir Mohammed Jega, Delegation 8. Adanu Gabriel Ochai, Delegation 9. Chijioke Onyemaobi, Delegation 10. Md. Abdul Wohab, Delegation 11. Md. Abdul Mukim Sarker, Delegation 12. ABM Salah Uddin, Delegation 13. Saleem Ahmad Khan, Delegation 14. Monirul Islam Akhand, Delegation 15. Mohammad Zakir Hossain, Delegation 16. Mizanur Rahman Shameen, Delegation 17. Syed Misbahuddin Ahmed, Delegation 18. Mohammad Monjur Kabir Bhuiyan, Delegation 19. AKM Saiful Islam, Delegation 20. ABM Azad, Delegation 21. Golam Shafiudin, Delegation 22. MD. Mohsin Hossain, Delegation

23 Shah Ahmed Shafi, Delegation
24 Nizam Uddin Ahmed, Delegation
25 Ferdous Ahmed, Delegation
26 Anirban Neogi, 2nd Secretary Bangladesh Embassy
27 Moh. Reza Pahlevi, Protocol Officer Bangladesh Embassy
28 H.E Mr. MD. Nazmul Qauunine, Ambassador of the People's Republic of Bangladesh
29 Wakil Ketua Komisi I DPR, Asril Hamzah Tanjung,
30 Sekjen DPR RI, Dr. Winantuningtyastiti, M.Si
31 Deputy Bidang Persidangan Dra. Damayanti
32 Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen, Drs. Saiful Islam, M.Si
33 Staf Khusus Ketua DPR RI Irias Indira Murti.

KEPUTUSAN / KESIMPULAN

I. Pendahuluan

Rapat dibuka oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin, pada pukul 13.00 WIB

II. Kesimpulan / Keputusan

1. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPR didampingi Wakil Ketua Komisi I DPR, Asril Hamzah Tanjung, SIP; Sekretaris Jenderal DPR, Dr. Winantuningtyastiti, M.Si.; Deputy Persidangan, Dra. Damayanti; Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen, Drs. Saiful Islam, M.Si.; Staf Khusus Ketua DPR Iris Indira Murti. Sedangkan delegasi National Defence College (NDC) didampingi oleh delegasi yang berjumlah sekitar 28 orang (25 dari NDC dan sekitar 3 orang dari Kedutaan).
2. Karena tujuan kunjungan delegasi adalah untuk mengetahui situasi terkini dari kondisi politik dan ingin belajar system parlemen di DPR, maka Ketua DPR memberikan *briefing* kepada delegasi. Semenjak UUD 1945 di amandemen beberapa kali, posisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) makin bertambah kuat. Ada 4 fungsi DPR yaitu fungsi legislasi, pengawasan, anggaran dan diplomasi. Pasal 20 Ayat 1 UUD 1945 menyatakan DPR memiliki kekuasaan menyusun undang-undang, namun pada ayat 2 dikatakan proses pembuatan undang-undang juga mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Pemerintah. Apabila tidak mendapat persetujuan keduanya, maka Rancangan Undang-undang tidak bisa disahkan. Fungsi pengawasan yaitu DPR mengawasi kinerja pemerintah. Apabila pemerintah tidak bekerja sebagaimana mestinya dan melanggar undang-undang maka DPR mempunyai kekuasaan untuk menegur pemerintah. Oleh karena itu DPR mempunyai hak-hak menyatakan pendapat, interpelasi dan angket. Ketua DPR mempunyai pengalaman dalam hak angket. Ketika terjadi kasus *Bulog Gate*, DPR mengadakan penyelidikan dan berhasil. Ketua DPR merupakan salah satu Anggota DPR yang menjadi Tim Penyelidik dalam kasus *Bulog Gate*. Fungsi Anggarannya itu jika Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diajukan Pemerintah tidak disetujui oleh DPR maka Pemerintah tidak bisa menggunakan APBN tersebut. Yang terakhir yaitu fungsi diplomasi. Dalam menjalankan fungsi ini DPR melakukan hubungan bilateral dan multilateral dengan parlemen di seluruh dunia selain itu, DPR membentuk Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) yang salah satunya adalah GKSB DPR RI dengan parlemen Bangladesh.
3. Ketua melanjutkan, di DPR terdapat 11 komisi dan 11 badan. Dalam pertemuan itu dijelaskan secara ringkas ke 11 komisi dan pasangan kerjanya. Sebagai contoh Komisi I yang juga memiliki kekuasaan dalam penempatan Duta Besar baik Duta Besar Indonesia di negara asing maupun Duta Besar asing di Indonesia.

Di dalam kompleks parlemen ini ada juga institusi lain yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota-anggota DPD dipilih secara langsung dari tiap provinsi. Jumlah Anggota DPD yang dipilih tiap provinsi yaitu sebanyak 5 orang. Untuk seluruh provinsi di Indonesia terdapat 34 provinsi. Tugasnya yaitu mengakomodasi aspirasi daerah di seluruh Indonesia. Saat ini sedang ada wacana dan perdebatan, apakah lembaga ini perlu diperkuat atau dibubarkan. Selain itu di kompleks parlemen juga terdapat institusi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebelum konstitusi Indonesia diamandemen, lembaga ini adalah Lembaga Tertinggi Negara namun setelah adanya amandemen, tidak ada lagi Lembaga Tertinggi Negara karena posisi MPR sama dengan lembaga lainnya sehingga kini yang ada Lembaga Tinggi Negara. MPR bertugas mengamandemen konstitusi dan jika tindakan presiden telah melanggar konstitusi maka MPR dapat memberhentikan presiden.

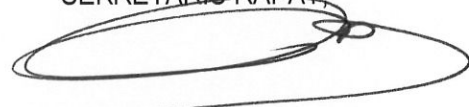
4. Dalam tanggapannya, Ketua Delegasi, Mr. Chowduri Hasan Sarwadi, menjelaskan NDC adalah pusat pelatihan tertinggi bidang pertahanan dan keamanan. Para peserta pelatihan berasal dari Angkatan Bersenjata, birokrat sipil, diplomat dan polisi. Saat ini terdapat sebanyak 94 orang peserta pelatihan dan peserta yang berasal dari negara lain sebanyak 28 orang. Hasil-hasil pelatihan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang keamanan, pembuatan kebijakan, pembangunan, dan keamanan regional serta internasional. Pada zaman merebut kemerdekaan, dari penjajah, sama seperti Indonesia, banyak rakyat Bangladesh yang menjadi korban. Konstitusi Bangladesh juga menjamin hak-hak rakyat. Undang-undang disahkan oleh parlemen, apabila undang-undang malah menimbulkan kontradiksi dan melanggar hak-hak rakyat, maka undang-undang dapat dibatalkan. Dari keadaan tercermin bahwa konstitusi Bangladesh merefleksikan keinginan dan mewakili rakyat. Peran Angkatan Bersenjata Bangladesh sejak disahkannya konstitusi tahun 1972 juga sangat besar bagi rakyat Bangladesh. Angkatan bersenjata membantu rakyat baik di kala perang maupun terjadi bencana alam dan berkomitmen untuk menciptakan stabilitas.
5. Duta Besar Bangladesh menambahkan mengenai Parlemen Bangladesh. Saat ini Anggota Parlemen Bangladesh berjumlah 350 orang, 50 diantaranya adalah wanita. Saat ini oposisi dipimpin oleh Anggota Parlemen perempuan. Kunjungan kali ini ke Indonesia sangat berarti karena Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara dan pendiri utama ASEAN. Sekalipun kunjungan ini singkat tetapi Duta Besar berharap hubungan baik ini tetap terus terbina. Atas nama delegasi ia sangat berterimakasih atas input dari DPR.
6. Terkait dengan NDC, Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina Wajed adalah ketua NDC yang didirikan tahun 1999. Karena pendiri NDC adalah Perdana Menteri, maka NDC memiliki hak-hak istimewa. Dalam isu keamanan, dikatakan antara keamanan dan pembangunan adalah isu yang saling berhubungan dan sama pentingnya. Focus pemerintah Bangladesh adalah terus menegakan konstitusi, memperkuat pemerintahan, mencegah aksi teroris, menjaga keamanan regional dan internasional dan kewaspadaan dalam isu bencana alam. Terkait dengan kemerdekaan Bangladesh, Mr. Chowduri sangat mengapresiasi dukungan Indonesia atas kemerdekaan Bangladesh. Indonesia adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Bangladesh dan hubungan kedua negara dimulai sejak tahun 1972. Semenjak itu hubungan makin meningkat. Kedua negara saling bekerja sama dan mendukung dalam forum-forum internasional seperti Gerakan Non Blok, Konferensi Negara-negara Islam dan 12 forum internasional lainnya. Kegiatan NDC dilakukan berdasarkan riset. Peserta diklat pada akhir pendidikan diharapkan dapat menyerahkan hasil penelitian (semacam tesis). Lama pendidikan yaitu 1 tahun. Selain kegiatan tersebut, dilakukan juga kunjungan ke negara-negara lain contohnya yaitu yang saat ini dilakukan, kunjungan ke DPR RI untuk mendapatkan studi empiric. Diskusi dengan Ketua DPR hari ini dinilai sangat penting. Atas nama NDC dan Perdana Menteri Bangladesh, Mr. Chowduri mengucapkan banyak terimakasih.
7. Wakil Ketua Komisi I, Asril Hamzah Tanjung menambahkan paparan singkat mengenai kondisi keamanan Indonesia yang terkait dengan kerja komisi I. dalam kaitannya dengan pertahanan, dimanapun negaranya akan mengacu pada dua hal yaitu keamanan dalam dan luar negeri. Keamanan dalam negeri yaitu

pengamanan dalam pemilihan umum, mencegah dan memberantas terorisme, dan isu keamanan. Khusus untuk yang terakhir, isu yang populer adalah masalah Papua dan Aceh. Untuk isu keamanan luar negeri, isu yang saat ini hangat yaitu isu Laut China Selatan yang menjadi pemicu ketidakharmonisan hubungan Tiongkok dengan Filipina. Indonesia sangat siap dengan segala kemungkinan yang terjadi bahkan jika terjadi perangpun Indonesia telah siap. Kemudian dalam isu perdamaian dunia, Indonesia sama seperti Bangladesh juga mengirimkan pasukan perdamaian dunia di bawah bendera PBB dan saat inipun pengiriman pasukan masih dilakukan. Ia berharap kerjasama antara NDC dengan Lemhanas dapat terus dilakukan.

III. Penutup

Rapat ditutup pada pukul 15.00 WIB

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,



Drs. Robert Juheng Purba
NIP. 19620703 199203 1 002